

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era globalisasi yang terjadi di Indonesia saat ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dalam masa pemerintahan saat ini, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan dan perdagangan. Di mulai dengan beberapa daerah yang ada sudah saling menggalakkan program UMKM di daerahnya masing-masing agar semakin maju. Bagi beberapa daerah yang ada menganggap dengan memajukan bidang UMKM ada harapan untuk memajukan daerah yang ada dan meningkatkan taraf hidup masyarakat masing-masing daerah tersebut. Dengan banyaknya UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia maka perlu diterapkannya kebijakan-kebijakan untuk mengatur dan membantu UMKM yang ada agar dapat berkembang dengan baik dan dapat bersaing satu dengan yang lainnya.

Dalam upaya untuk mengembangkan atau memberdayakan UMKM yang sudah ada, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kebijakannya. Pada saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk membantu pemberdayaan UMKM di setiap daerah salah satunya dengan membentuk Kementerian khusus untuk UMKM dan Koperasi. Di harapkan dengan adanya Kementerian yang khusus untuk UMKM dapat pemerintah daerah dalam usahanya untuk mengembangkan UMKM serta dapat memantau proses pengembangan UMKM yang sedang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Peran pemerintah yang penting dalam pemberdayaan UMKM salah satunya yaitu terwujud dalam bentuk suatu kebijakan yang mengatur mengenai UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM ini telah diatur berbagai hal yang berkaitan dengan UMKM, kriteria UMKM, pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan koordinasi, serta sanksi administratif.

Berkaitan dengan terbitnya UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013 yang berisi tentang pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Tujuan dari dikeluarkannya PP ini adalah sebagai kebijakan operasional untuk melaksanakan atau mengimplementasikan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Di dalam PP no. 17 tahun 2013 berisi mengenai penjelasan dalam melaksanakan isi dari UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Pemberdayaan UMKM bukanlah hal yang mudah. Masih terdapat beberapa masalah dalam pemberdayaan UMKM yang secara umum terjadi pada setiap UMKM yang ada di Indonesia.

Masalah yang dihadapi UMKM salah satunya adalah kurangnya kualitas pelaku UMKM. Menurut Wisber Wiryanto (2012:8) dalam makalahnya menyatakan permasalahan yang di hadapi UKM meliputi : keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku UKM, akses terhadap sumber sumberdaya produktif seperti keterbatasan permodalan dan akses teknologi. Masalah infrastruktur, seperti pasar yang representatif dan sarana jalan yang memudahkan bagi UKM untuk menjual hasil usahanya, dan masalah birokrasi

pemerintah, seperti kualitas sumberdaya aparatur pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan bagi UKM.

Untuk dapat mendukung program pemerintah dalam mengatasi permasalahan UMKM, maka diperlukan adanya koordinasi dan sosialisasi terhadap , UMKM. Ina Primiana seorang Ekonom Universitas Padjajaran dalam sebuah media elektronik metrotvnews.com tertanggal 17 Juli 2013, mengatakan bahwa program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia seperti kurang perhatian dari pemerintah.

Lebih lanjut, berdasarkan pada studi yang dilakukan *Keenan Institute Asia* (Lembaga No-profit di Thailand) yang dilaksanakan pada tahun 2012 bahwa terdapat 15 persoalan utama yang dihadapi oleh UMKM. Persoalan tersebut meliputi : masalah dengan citra wirausahawan, program UMKM yang dibuat pemerintah dianggap kurang, sulitnya memulai usaha baru, rendahnya daya beli konsumen, persoalan pajak, tidak adanya dukungan pemerintah lokal, kurangnya koordinasi antara lembaga yang memayungi UMKM, kebijakan yang kurang mendukung, kemampuan manajemen pelaku UMKM, kualitas produk yang kurang, kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas, UMKM tidak tahu informasi pasar, UMKM tidak punya kemampuan pemasaran, dan kesulitan akses kredit.

Masalah yang dihadapi UMKM tidak hanya terletak pada rendahnya kualitas SDM pelaku UMKM dan kurangnya sosialisasi dan koordinasi saja, akan tetapi permodalan juga menjadi masalah yang selalu dihadapi oleh UMKM.

Sebenarnya pemerintah sudah membantu menyediakan mitra permodalan, akan tetapi dalam pelaksanaannya pelaku UMKM masih dihadang beberapa masalah. Rizka Zulfikar, S.TP, MM (2013) dalam makalahnya memaparkan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam mendapatkan permodalan usaha adalah meliputi prosedur pengajuan pinjaman yang sulit, tidak adanya agunan (jaminan), ketidaktahuan tentang prosedur dan suku bunga yang tinggi.

Dalam rangka membangun masyarakat yang menyeluruh dari segi sosial ekonomi dan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia memegang penyerapan tenaga kerja yang cukup besar yaitu 97,85 % pada tahun 2010 (BPS, 2010). Jika UMKM mendapat perhatian dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, maka UMKM juga dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli dan Daerah (PAD). Industri kecil yang ada di Indonesia diartikan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan. UMKM bertujuan memproduksi barang dan jasa untuk di perniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak RP 200 juta dan mempunyai nilai penjualan per tahun tidak lebih dari Rp 1 milyar. Sedangkan industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa guna diperniagakan secara komersial dengan nilai penjualan per tahun lebih dari Rp 50 milyar (UU RI No. 9 Tahun 1995). Batasan mengenai skala usaha menurut BPS yaitu berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu industri kecil sebanyak 5-19 orang dan industri menengah sebanyak 20-99 orang (Prawirokusumo, 2010).

Banyaknya daerah yang sudah mulai mengembangkan sektor UMKM juga berdampak kepada daerah-daerah kecil lainnya yang mempunyai produk unggulan di bidang UMKM termasuk Kota Kediri. Dengan produk unggulannya yang banyak, mulai dari olahan tahu, gethuk pisang, kain rajut, serta sate bekicot membuat pemerintah Kota Kediri juga semakin termotivasi untuk ikut mengembangkan produk-produk UMKM yang ada di daerah mereka. Meski setiap UMKM memiliki kebutuhan yang berbeda namun pemerintah Kota Kediri tetap dengan segala upayanya merumuskan kebijakan yang akan berguna bagi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Kediri.

Di Kota Kediri telah dilaksanakan program pemberdayaan yang direncanakan oleh pemerintah kota Kediri dan dilaksanakan oleh Lembaga aparatur yang ada di Kota Kediri termasuk Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri. Serta dengan adanya program Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) yang sedang di jalankan oleh Pemerintah Kota Kediri dengan memberikan setiap desa kebebasan untuk melakukan kebijakan di daerahnya masing-masing membuat program pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan UMKM juga dapat berjalan. Harapan dari Pemerintah Kota Kediri dengan adanya program/kebijakan tersebut dapat membantu pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Kediri untuk menjadi lebih berkembang dan maju dari sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Kota Kediri Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tujuan dari pemberdayaan adalah meningkatkan peran serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis

pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis, pada sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan pemberdayaan UMKM di atas menunjukkan betapa pentingnya peran UMKM terhadap tumbuh kembang dan perekonomian masyarakat yang ada di daerah. Produk olahan tahu menjadi salah satu produk kuliner atau oleh-oleh andalan yang ditawarkan oleh Kota Kediri, karena memang Kota Kediri disebut dengan Kota Tahu, hampir di setiap daerah yang ada di Kediri memiliki UMKM yang bergerak di bidang olahan tahu, baik yang kecil maupun yang sudah menjadi besar. Namun dengan banyaknya usaha yang bergerak di bidang olahan tahu tersebut juga memunculkan kompetisi bagi tiap pengusaha kecil maupun besar, karena setiap pengusaha akan berusaha memasarkan produknya agar dapat diterima oleh konsumen dan mendapatkan hasil dari penjualan tersebut. Persaingan yang muncul juga memunculkan keresahan bagi pengusaha kecil yang khawatir apabila produk yang mereka tawarkan tidak dapat bersaing dengan pengusaha yang sudah besar dan memiliki nama. Permasalahan permodalan, kurangnya sumber daya yang ada, dan kualitas produk yang masih kalah menjadi beberapa masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil agar dapat bersaing dengan pelaku usaha olahan tahu lain yang ada di Kota Kediri. Dari segi modal memang terlihat bahwa mereka kalah jika dibandingkan usaha olahan tahu yang lebih besar, begitu juga dengan sumber daya yang ada. Perlu adanya strategi-strategi khusus yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas UMKM dan Koperasi Kota Kediri untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar para

pemilik usaha kecil juga mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan produk-produknya yang diyakini tidak kalah kualitas.

Dengan adanya permasalahan di atas maka implementasi kebijakan publik yang sudah di buat oleh pemerintah Kota Kediri diharapkan dapat berjalan dengan baik dengan dukungan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya termasuk Dinas Koperasi dan UMKM serta para pelaku UMKM tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan cakupan upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi lokal, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pemberdayaan UMKM yang sudah berjalan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi pemerintah dalam upaya meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kota Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk usaha pemberdayaan UMKM yang sudah dijalankan oleh pemerintah dalam meningkatkan UMKM lokal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi pemerintah dalam usahanya untuk memberdayakan UMKM lokal di Kota Kediri.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Manfaat Akademis
  - a. Memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan konsep teori dalam ruang lingkup disiplin Ilmu Administrasi Publik khususnya bagi Implementasi Kebijakan Publik.
  - b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan refrensi bagi peneliti yang lain sebagai bahan pembanding untuk penelitian selanjutnya, dan dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bahan masukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri dalam pengembangan program pro masyarakat untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang ada di Kota Kediri.
  - b. Penelitian ini merupakan wadah untuk mengimplementasikan ilmu ekonomi pembangunan dalam perspektif ilmu administrasi publik guna mensejahterahkan kehidupan masyarakat.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun isi dari tiap-tiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

BAB III. METODE PENELITIAN

BAB IV. HASIL PEMBAHASAN

BAB V. PENUTUP